

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting yakni Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2021 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah dipogramkan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang diharapkan mampu mewujudkan tujuan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan berkelanjutan melalui program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Diharapkan nantinya perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas sesuai indikatornya dan terukur.

Padang Panjang, 2020

Kepala Dinas,

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Nip.19770522 199511 1 001

DAFTAR ISI

Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Bab I	: Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab II	: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
Bab III	: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
	3.1 Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional	22
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
	3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV	: Rencana Kerja dan Pendanaan	24
BAB V	: Penutup	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	4
Tabel 2.2	Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra (TC.29)	6
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
Tabel 2.4	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah (TC.30)	14
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah	16
Tabel 2.6	Data Dasar Indikator Kinerja Sasaran Daerah	16
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun lalu, meliputi; evaluasi pencapaian target program dan kegiatan. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4982);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggara fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dimana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang terdiri dari 8 (delapan) program dengan 30 (tiga puluh) kegiatan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 sebagai pijakan pertama masa RPJMD Kota Padang Panjang periode 2018-2023.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan tahun 2019 dapat dilihat pada hasil capaian kinerja indikator RPJMD 2018-2023 dan capaian kinerja indikator renstra 2018-2023 pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Angka Kecelakaan	Angka	37	43	83,78	39	0,9
Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	Persentase panjang trayek jalan terlayani	Persen	27,02	27,02	100	27,02	0
	Persentase kendaraan lulus uji keur	Persen	97,56	97,65	100,10	97,14	0,99

Dapat dilihat dari tabel diatas adanya realisasi kinerja yang mengalami kenaikan atau penurunan sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja tahun 2019.

➤ **Jumlah Kecelakaan**

Angka kecelakaan yang terjadi di Kota Padang Panjang tahun 2019 mengalami capaian sebesar 83,78% dari target angka kecelakaan sebanyak 37 dengan realisasi kinerja sebanyak 43. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,9% dengan realisasi kinerja sebanyak 39. Faktor naiknya angka kecelakaan pada tahun 2019 lebih dominan dikarenakan kesalahan manusia (human error).

➤ **Persentase panjang trayek jalan terlayani**

Panjang trayek jalan terlayani pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga realisasi kinerja 100%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 pun tidak mengalami perubahan signifikan, karena tidak ada penambahan panjang jalan trayek dari 28,5 Km yang aktif dari total panjang jalan 105,46 Km (27,02%).

➤ **Persentase kendaraan lulus uji keur**

Target indikator ini pada tahun 2019 mengalami capaian sebesar 100,10% dari target persentase kendaraan lulus uji keur 97,56% dengan realisasi kinerja 97,65, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 97,14% maka terjadi kenaikan sebesar 0,99%. Data kendaraan yang lulus uji keur per jumlah taman kendaraan terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari angka target, dimana target data kendaraan yang lulus uji keur adalah 2078 kendaraan per jumlah taman kendaraan 2130 atau (97,56%) sedangkan realisasi data kendaraan lulus uji keur tahun 2019 sebanyak 2163 kendaraan per jumlah taman kendaraan tahun 2019 sebanyak 2215 atau (97,65%).

Adapun gambaran evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel TC. 29 dibawah ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan target kinerja 15 unit kendaraan dinas/operasional, namun realisasi kinerja pemeliharaan kendaraan/operasional hanya 13 unit, 2 unit diantaranya rusak berat yakni kendaraan roda 2.
 - ✓ Faktor penyebab rendahnya realisasi keuangan karena dana pemeliharaan tidak mencukupi utk perbaikan aset dalam kondisi rusak berat.
 - ✓ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah adalah tidak tercapainya realisasi indikator program pelayanan administrasi perkantoran senilai 90%.
 - ✓ Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran adalah meningkatkan kualitas penyusunan rencana kegiatan dengan melihat kondisi aset kendaraan layak pakai.
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor, dengan dana sebesar Rp. 20.770.000,- dimana realisasi keuangan hanya Rp. 7.926.000,- (38,16%).
 - ✓ Faktor penyebab rendahnya realisasi keuangan karena ada beberapa alat-alat yang belum bisa diperbaiki karena dana perbaikan lebih besar dari penghitungan perbaikan aset 10 % dari harga aset. Perbaikan alat-alat lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan.
 - ✓ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah adalah tidak tercapainya realisasi indikator program peningkatan sarana dan prasarana aparatur senilai 90%
 - ✓ Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran adalah meningkatkan kualitas penyusunan rencana kegiatan dengan mencantumkan belanja global pemeliharaan alat-alat kantor agar dapat dipergunakan secara efektif.
 - c. Program Pelayanan Angkutan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Penyuluhan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan, dengan dana awal anggaran sebesar Rp. 34.350.000,- dan pada perubahan anggaran menjadi Rp. 0,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%).
 - ✓ Faktor penyebabnya hilangnya anggaran kegiatan ini karena pengalihan anggaran pada kegiatan yang lebih urgen dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan yaitu pergeseran dana pada kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan, belanja perjalanan dinas untuk menjemput piala WTN 2018-2019 Tanpa Pengecualian Kota Padang Panjang.
 - ✓ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah adalah tidak tercapainya realisasi indikator kegiatan penyuluhan ketertiban lalu lintas sedang realisasi indikator program secara keseluruhan tidak berdampak signifikan.
 - ✓ Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran adalah meningkatkan kualitas penyusunan rencana kegiatan dengan menentukan kegiatan prioritas urusan perhubungan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pehubungan
 - ✓ Kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, dengan target kinerja 4 kegiatan. Capaian kinerja terlaksanakannya 4 (empat) kegiatan yaitu tim gabungan pengendalian trantib dalam terminal, tim gabungan uji petik angkutan barang dan angkutan orang, tim uji petik ulang laik kendaraan lebaran dan pelaksanaan retribusi terminal (pangkal truk).
 - b. Program Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
 - ✓ Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, dengan target kinerja 10 (sepuluh) unit alat uji. Capaian kinerja telah dilaksanakan pemeliharaan 10 (sepuluh) unit alat uji kendaraan bermotor pada unit UPTD PKD Dinas Perhubungan.
 - ✓ Rehabilitasi Pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu, Traffic, Warning Light, Halte dan Traffic ligh dan Marka Jalan dengan target kinerja 1 tahun. Capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas seperti rambu-rambu, warning light/traffic light dan halte.
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - ✓ Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan, dengan target kinerja 8 orang tenaga pemungut retribusi parkir. Capaian kinerja kegiatan ini terpenuhinya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh 8 (delapan) orang tenaga harian lepas.
 - ✓ Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, dengan target kinerja 1 tahun, 11 orang tenaga harian lepas. Capaian kinerja kegiatan ini terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya atas partisipasi dan kerjasama 11 (sebelas) orang tenaga bantuan lalu lintas baik pengendalian tim poskotis, pengamanan acara khusus dan patroli pengawasan malam hari.
 - ✓ Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan, dengan target kinerja tersusunnya 10 (sepuluh) dokumen data base. Capaian kinerja kegiatan ini tersusunnya 10 dokumen data base di bidang angkutan dan pelaksanaan WTN sekaligus diraihnya penghargaan WTN Tanpa Pengecualian dan pengadaan aplikasi smart traffic.
 - ✓ Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/Awak kendaraan angkutan umum teladan, dengan target kinerja diikutinya kegiatan ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Capaian kinerja kegiatan ini terlaksananya pemilihan sopir/juru mudi yang diikuti sebanyak 25 orang dan terpilih sebanyak 3 (tiga) orang juru mudi teladan. Peringkat 1 diutus ke tingkat Propinsi Sumatera Barat.
 - ✓ Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, dengan target kinerja diikuti oleh pelajar sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Capaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ sebanyak 3 orang dari 25 orang peserta pelajar se Kota Padang Panjang. Peringkat 1 dan 2 diutus ke tingkat propinsi dan meraih peringkat 2 dan 5, dan kembali diutus ke tingkat pusat dan meraih peringkat ke 12.
 - ✓ Kegiatan Penertiban dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang di jalan, dengan target kinerja 15 (lima belas) hari razia. Capaian kinerja kegiatan ini terlaksananya kegiatan razia penertiban dan pengendalian perizinan angkutan orang dan barang selama 15 (lima belas) hari kerja.

- ✓ Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dengan dana target kinerja 3 kali kegiatan. Capaian kinerja kegiatan ini terlaksanakannya pertemuan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 2 kali dalam rangka hari raya lebaran dan pergantian tahun bersama instansi terkait (TNI/Polri/Jasa Raharja dan Organda).

d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- ✓ Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, dengan target kinerja 35 unit rambu-rambu, capaian kinerja kegiatan ini terpasangnya 28 (dua puluh delapan) unit rambu-rambu pada area pasar pusat Kota Padang Panjang, 2 (dua) unit RPPJ di simpang Monas, dan 5 (lima) unit cermin tikung pada simpang 3 arah kantor lurah Tanah Pak Lambik, simpang 3 SD Kelurahan Kebun Sikolos, simpang 3 Sungai Andok, simpang RSUD, dan simpang Guguk Malintang (Tanah Bato) .
- ✓ Pengadaan Marka Lalu Lintas, dengan target kinerja 1 tahun, capaian kinerja kegiatan ini terpasangnya marka jalan sepanjang 633 m2 di jalan Soekarno Hatta dan jalan Agussalim.
- ✓ Pengadaan Speed Bump, dengan target kinerja 208 set, capaian kinerja kegiatan ini terpasangnya speed bump sebanyak 18 titik di wilayah Kota Padang Panjang dapat mengurangi angka kecelakaan dengan cara mengurangi kecepatan kendaraan pada lokasi; ruas jalan Dinniyah Putri, 2 unit; ruas jalan kelurahan Kampung Manggis, 2 unit; ruas jalan kelurahan Tanah Pak Lambik, 3 unit; ruas jalan Kampung Jambak (STSI), 2 unit; ruas jalan SMAN 3, 4 unit; ruas jalan kelurahan Ganting, 2 unit; ruas jalan kelurahan Sigando, 1 unit; ruas jalan Gajah Tanang, 2 unit.
- ✓ Pengadaan Guadril, dengan target kinerja 100 meter, capaian kinerja kegiatan ini terpasangnya pagar pengaman/guardrail pada ruas jalan sepanjang 100 M di kelurahan Koto Katiak.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memaparkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator Program Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel TC. 30

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2019 juga dapat dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran daerah yang mendukung tercapainya sasaran meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berkualitas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3
Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	80,40%	80,40%

Dapat dilihat bahwa pemenuhan indikator kinerja sasaran daerah urusan perhubungan dengan target 80,40% dan capaian realisasi 80,40% dimana capaian ini cukup memuaskan dan penyediaan fasilitas keselamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Adapun sarana pendukung fasilitas keselamatan lalu lintas keadaan sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Dasar Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Tahun 2019

No	Kegiatan	Pembilang/ Penyebut	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan
1.	Warning Light	$\frac{20}{25} \times 100\%$	80,00%	80,00%	0%
2.	Traffic Light	$\frac{4}{7} \times 100\%$	57,14%	57,14%	0%
3.	Rambu-Rambu	$\frac{705}{877} \times 100\%$	80,39%	79,69%	0,008%
4.	Halte	$\frac{21}{24} \times 100\%$	87,50%	87,50%	0%
5.	Cermin Tikung	$\frac{32}{33} \times 100\%$	96,97%	96,43%	0,005%
Total Persentase kegiatan			80,40%	80,15%	

Dinas Perhubungan pada Tahun 2019 telah berupaya memenuhi fasilitas lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, sebagai berikut :

- ✓ Warning Light hingga tahun 2019 total warning light yang terpasang 25 unit, dan hanya 20 unit warning light yang berfungsi baik dari 25 unit yang tersedia sehingga capaian kinerja sampai tahun 2019 mencapai 80,00% dengan kinerja bernilai Baik, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 tidak ada perubahan naik/turun.
- ✓ Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas pada suatu persimpangan jalan dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan untuk bergerak secara bergantian dan hal ini diharapkan dapat menurunkannya tingkat kemacetan lalu lintas, hal ini menjadi salah satu sasaran kinerja dengan pengadaan traffic light dimana hingga tahun 2019 sarana Traffic Light terpasang pada 4 lokasi persimpangan titik dalam kondisi baik dari 7 titik lokasi yang terpasang, dan capai kinerja baru 57,14%, dibandingkan

- dengan realisasi kinerja tahun 2018 belum ada peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualitas sarananya.
- ✓ Rambu lalu lintas berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas, dalam hal membentuk kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai termasuk rambu-rambu lalu lintas. Pada tahun 2019 terdapat penambahan pemasangan rambu-rambu pada area pasar pusat kota Padang Panjang sebanyak 28 unit dan pemasangan RPPJ 2 unit di simpang Monas Ngalau sehingga sampai dengan tahun 2019 berjumlah 705 unit dalam keadaan baik dari 877 unit rambu-rambu atau mencapai 80,39%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja 79,69% maka terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 0,008% hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penambahan jumlah rambu – rambu lalu lintas dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai.
 - ✓ Hingga tahun 2019 jumlah halte yang tersedia 21 unit dalam kondisi baik dari total 24 unit yang ada dengan capaian kinerja sebesar 87,50%, keberadaan halte ini masih dibutuhkan sebagai salah satu bagian dari prasarana angkutan umum bagi masyarakat Kota Padang Panjang yang sehari-harinya menggunakan jasa angkutan dalam beraktivitas, selain sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dalam kondisi sekarang halte adalah sebagai simpul dan transfer poin bagi pengguna moda transportasi umum.
 - ✓ Cermin Tikung merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pemasangan cermin cembung ini masih sangat diharapkan masyarakat dengan kondisi jalan di Kota Padang panjang yang berkelok – kelok dengan kebebasan pandang yang kecil, sampai tahun 2019 capaian kinerja pemasangan ini adalah 32 unit dalam kondisi baik dari 33 unit yang telah terpasang sehingga persentase capaian kinerja mencapai 96,97%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 96,43% terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 0,005%. Melihat kondisi geografis Kota Padang Panjang maka kebutuhan akan cermin tikung cukup tinggi.

Data pada tabel diatas adalah jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang dalam keadaan baik per jumlah jenis fasilitas keseluruhan, adapun pemasangan baru fasilitas tersebut sebagai berikut :

- Terpasangnya rambu-rambu lalu Lintas sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit di area pasar pusat Kota Padang Panjang dan RPPJ sebanyak 2 (dua) unit di simpang Monas Kota Padang Panjang.
- Terpasangnya cermin tikung 5 (lima) unit pada lokasi :
 - a. Simpang 3 arah kantor lurah Tanah Pak Lambik;
 - b. Simpang 3 SD Kelurahan Kebun Sikolos;
 - c. Simpang 3 Sungai Andok;
 - d. Simpang RSUD;
 - e. Simpang 3 Guguk Malintang (Tanah Bato).

Adapun pengadaan sarana keselamatan lalu lintas selain yang menjadi data penghitungan dasar indikator kinerja sasaran daerah, juga telah mengakomodir beberapa usulan musrenbang dan realisasinya sebagai berikut :

- Pemasangan tanggul/speed bumps sebanyak 208 set pada 18 titik ruas jalan.
- Pemasangan pagar pengaman/guardrail sepanjang 100 meter pada kelurahan Koto Katik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Adapun isu-isu penting yang sangat mendasar sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang antara lain :

1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang (sesuaikan dg renstra)

- a. Belum optimalnya angkutan umum sebagai sarana angkutan massa;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas;
- c. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas;
- d. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor;
- e. Belum memadainya terminal dan pangkalan truk;
- f. Sarana dan prasarana lalu lintas yang rawan pencurian dan pengrusakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 telah berupaya menyaring dan menelaah usulan–usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.

Usulan – usulan yang disampaikan masyarakat, sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

Adapun usulan–usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum nasional bidang perhubungan adalah mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan menyediakan infrastuktur perlengkapan lalu lintas yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan tranportasi lalu lintas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang merupakan rangkuman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 terencana dengan baik serta dapat mengakomodir usulan–usulan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ditingkat Kelurahan dan ditingkat Kecamatan yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan yakni “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan”, didukung dengan capaian sasaran meningkatnya ketertiban lalu lintas dan meningkatnya pelayanan angkutan jalan di kota Padang Panjang.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 yang meliputi 5 program dengan 18 kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan ;
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 3. Penyediaan Makanan dan Minuman
 4. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 5. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
 6. Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat
 7. Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan ;
 1. Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor
 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung dan Alat-alat kantor
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan;
 1. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
 2. Penertiban dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang
 3. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

- 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 2. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin rambu-rambu, traffict light, warning light, running text, halte
 3. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
 4. Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 5. Pengadaan rambu-rambu dan fasilitas keselamatan lalu lintas

- 5) Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
 1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan bermotor

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2021 memuat Program dan Kegiatan beserta anggaran dana perangkat daerah tahun 2021. Hal ini merupakan korelasi yang tidak terpisahkan karena perwujudan dari rencana kerja adalah realisasi fisik dan keuangan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang diawali rapat internal perangkat daerah, rapat forum antara Organisasi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota Padang Panjang Tahun 2020, hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) disusun untuk Rencana Kerja Kota Padang Panjang yang di dalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pada tahun 2021. Rencana Kerja ini adalah sebagai pijakan tahun pertama dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023. Untuk pelaksanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dijabarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja, kegiatan disini masih diperlukan penyempurnaan guna peningkatan capaian kinerjanya.

Untuk anggaran tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang akan melaksanakan 5 (Lima) program dan 18(delapan belas) kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang,

2020

KEPALA DINAS,

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19770522 199511 1 001